

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian ini didasarkan pada analisis hubungan ekonomi, yang merupakan bagian dari laporan APBD yang menjadi tanggung jawab utama daerah, dan menggunakan metrik kinerja keuangan daerah untuk menilai kelayakan suatu daerah. Juwita R. (2018) menyatakan bahwa "mengukur prestasi keuangan adalah penting untuk menilai peranan pemerintah kota dalam ekonomi wilayah. Perlu diingat bahwa akauntabiliti bukan sekadar kemampuan untuk melihat bagaimana dana masyarakat digunakan dengan efektif, efisien dan ekonomik". Mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah harus dilakukan dari sudut pandang keuangan serta non keuangan. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan gambaran tentang hasil keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aturan yang dipakai dalam membuat serta mengirimkan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Publik memiliki aturan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan keuangan.

Karena akuntansi publik mengumpulkan data keuangan dari berbagai pihak, perubahan diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen yang efektif. Perubahan akuntansi diperlukan dilandasi oleh landasan yang kokoh yaitu adanya standar akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 tentang "pengoperasian SAP menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan untuk digunakan sebagai acuan dan sebagai dasar untuk membuat keputusan, tolok ukur dan

standar yang dibuat oleh pemerintah, terutama pemerintah negara bagian dan daerah, untuk pemerintah dan organisasi satuan pemerintahan yang harus mengemukakan laporan keuangan, yang meningkatkan akauntabiliti dan ketelusan dalam pengurusan keuangan daerah”. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah mesti memenuhi kualiti berikut: relevan, boleh dipercayai, dapat dibandingkan dan boleh difahami.

Adanya transparansi pengelolaan keuangan daerah isu yang sangat penting saat ini. “Pemerintah kota berharap dapat menjalankan wilayah secara bebas, berkesan dan cekap dalam mengurus sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan peluang untuk penyertaan masyarakat dalam pembangunan”. (Lamangida, 2018). Tentu saja, untuk memenuhi harapan sosial, harus ada mekanisme.

Persyaratan standar untuk laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang lengkap, informasi, dan perencanaan yang jelas tanpa merugikan nasabah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditambahkan untuk memberikan informasi keuangan tingkat tinggi. Laporan keuangan mencerminkan kinerja Pemerintah. Untuk itu Pemerintah harus mampu membuat laporan keuangan yang baik.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia sering diperdebatkan karena banyak laporan yang tidak memenuhi peraturan dan masih banyak kasus yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini yang terjadi pada tahun 2022, realisasi belanja tercatat sebesar Rp 6.047.157.448.152,00 atau 78,85 persen. Menurut rincian jenis pengeluaran,

belanja pengelolaan pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 4.411.403.212.140,00 atau 83,55 persen. Anggaran belanja operasional tidak sepenuhnya terealisasi karena efektivitas belanja pegawai yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan belanja pegawai hanya mencapai Rp 1.859.029.655.901,00 atau 87,07 persen, belanja barang dan jasa Rp 2.358.847.879.020,00 atau 86,95 persen, belanja hibah Rp 136.623.526.219,00 atau 38,11 persen, dan belanja bantuan sosial Rp 56.902.151.000,00 atau 77,35 persen.

Pada Tahun Anggaran 2022, belanja modal terealisasi sebesar Rp 1.617.535.812.652,00 atau 69,56 persen. Ketidakrealisasian anggaran belanja modal di 27 LPPD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 disebabkan oleh belanja modal tanah yang hanya mencapai Rp 193.037.001.685,00 atau 49,54 persen, belanja modal untuk peralatan dan mesin Rp 413.338.138.958,00 atau 91,82 persen, belanja modal untuk bangunan dan struktur Rp 325.942.923.423,00 atau 83,55 persen, belanja modal untuk jalan dan jaringan pengairan Rp 670.339.241.437,00 atau 62,06 persen, dan belanja modal aset tetap lainnya Rp 14.878.507.149,00 atau 96,17 persen, sementara belanja tak terduga hanya Rp 18.218.423.360,00 atau 28,81 persen. Ketidakrealisasian anggaran belanja operasional, modal, dan tak terduga secara keseluruhan lebih disebabkan oleh efisiensi.

Permasalahan tersebut akan menyebabkan penurunan tingkat pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk dapat dihambat oleh standar akuntansi pemerintahan (SAP),

transparansi, serta laporan keuangan yang baik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbaikan yang diharapkan di masa depan dapat ditingkatkan melalui reformasi dan pelatihan di beberapa bidang, seperti meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah terkait standar akuntansi pemerintahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia yang terlibat harus diperhatikan, termasuk pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas hasil laporan keuangan daerah, pemahaman yang mendalam tentang standar akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

Transparansi oleh pemerintah memberi maklumat terbuka dan jujur kepada orang ramai supaya mereka dapat mengetahui akauntabiliti pemerintah terhadap undang-undang dan peraturan secara terbuka dan menyeluruh. Kurangnya Transparansi dalam pengurusan keuangan negara juga boleh memberi kesan pada kepercayaan orang ramai terhadap pemerintah.

Kualitas laporan keuangan adalah standar yang harus dipenuhi dalam maklumat akuntansi upaya dapat mencapai objektifnya. Minimalnya korupsi juga dipengaruhi oleh kurangnya perbaikan laporan keuangan di lembaga pemerintah.

Pemerintah yang bersih adalah contoh pemerintah yang jujur. Stabilitas pemerintah adalah definisi integritas pemerintah dua puluh tahun yang lalu. Dengan demikian, "selama Reformasi, kata kebenaran didefinisikan sebagai kekuatan murni. Oleh karena itu, perangkat yang tidak transparan harus diganti dengan yang baru." (Indra, 2010).

Pelaksanaan kegiatan keuangan oleh lembaga pemerintah dan pemantauan kualitas laporan keuangan meningkatkan situasi keuangan warga negara sehingga mereka dapat mengelola pemerintahan dengan baik..

Kota Medan merupakan kota yang terletak pada provinsi Sumatera Utara dengan sumber daya alam dan manusianya, memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang. Sebagai bagian penting dari provinsi Sumatera Utara, status dan potensi daerah, serta sosial ekonomi masyarakat, kota ini berfokus pada pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan layanan. Ini karena pemerintah daerah mengatur ekonomi, pembangunan, dan pelayanan publik. Untuk membangun pemerintahan provinsi yang bersih, mereka harus memiliki tata kelola dan manajemen keuangan yang jelas. Untuk membangun tata pemerintahan yang baik, mereka harus pandai mengelola pemerintahannya dan secara berkala menilai kinerja pemerintah selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat dengan tepat menemukan sumber dana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dana untuk pelaksanaan dan pengembangan daerah.

Berdasarkan informasi di atas, penulis merasa tertarik dalam melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Transparansi dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada OPD Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Moderasi”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Minimnya pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengakibatkan kinerja keuangan tidak optimal.
2. Kurangnya informasi yang jujur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah kepada masyarakat.
3. Kurangnya perbaikan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah untuk minimalnya praktik korupsi dan masih belum intensifnya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai standar akuntansi pemerintahan untuk pegawai yang berlatar belakang non akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini bisa mencapai tujuannya secara akurat, dan tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dipelajari, masalah perlu didefinisikan selama penelitian. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan dan pemantauan kualitas pelaporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah OPD dengan sistem pengendalian intern sebagai moderator dipelajari pada tahun 2024 dan fokus kajian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (RPO) yang terdapat pada data Pemerintah Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diterangkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah?

2. Apakah pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah?
3. Apakah pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah?
4. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah?
5. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah?
6. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penyelidikan ini yakni seperti berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.

6. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penyelidikan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atau faedah sama ada secara teori dan praktikal seperti berikut:

1. Penyelidikan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kesan penerapan standar akuntansi pemerintah, transparansi serta pemantauan kualiti laporan keuangan terhadap prestasi keuangan pemerintah di OPD melalui sistem kawalan dalaman sebagai penyederhanaan.
2. Diharapkan hasil kajian ini dapat bermanfaat khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD), berupa pengkajian dan tambahan informasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memberikan saran yang bisa dipertimbangkan pada pengambilan keputusan
3. Untuk peneliti yang akan datang, kajian ini boleh dijadikan rujukan pada kajian relevan dan diharap pengkaji akan datang dapat menyiasat dengan lebih lanjut sehingga terdapat kebaruaran kedepannya.